

PANDUAN PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA

VERSI 0.2 | OKTOBER 2020

Daftar Isi

Pengantar	2
Tahap 1: Memulai Proses & Memetakan Stakeholder	7
Tahap 2: Menganalisis Masalah Hak Asasi Manusia & Memilih Indikator	13
Tahap 3: Analisis Kondisi Pendukung & Mendesain Metrik	15
Tahap 4: Evaluasi Metrik Kinerja	19

Pengantar

Pelanggaran hak asasi manusia sering kali melampaui batas proyek, perkebunan, dan konsesi, karena penyebab dan konsekuensinya terkait dengan berbagai tingkat pemerintah, sektor, dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penilaian hak asasi manusia di tingkat lanskap merupakan kontribusi yang berguna untuk mengelola keberlanjutan dalam skala besar.

Penilaian hak asasi manusia pada skala ini merupakan bidang yang baru muncul, karena pekerjaan sebelumnya sebagian besar terdiri dari penilaian risiko hak asasi manusia secara luas pada skala nasional atau penilaian mendalam (tetapi seringkali tidak dapat direplikasi) di proyek, rantai pasokan, perkebunan, atau tingkat komunitas. Pendekatan LandScale untuk penilaian hak asasi manusia skala lanskap (lihat Gambar 1) sama sekali tidak lengkap, dan tidak boleh menggantikan tanggung jawab dan upaya individu dari perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan penilaian pada skala yang lebih kecil. Namun, menilai dan melacak masalah ini pada skala lanskap dapat melengkapi dan memandu penilaian dampak hak asasi manusia untuk mengidentifikasi masalah hak asasi manusia dan akar penyebabnya dan untuk memahami kondisi pendukung¹ yang diperlukan untuk mengatasinya.

Gambar 1. Indikator Hak Asasi Manusia LandScale

Tujuan 2.2 Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia			
Indikator	Deskripsi	Penerapan	Metrik kinerja
2.2.1 Pekerja anak	Insiden pekerja anak yang relevan dengan kegiatan ekonomi yang diminati	Tergantung-lanskap	2.2.1.1 Metrik ditentukan-penilai berdasarkan kondisi pendukung yang teridentifikasi (wajib) 2.2.1.2 Perkiraan jumlah pekerja anak dalam kegiatan ekonomi yang diminati (direkomendasikan)

¹ Kondisi pendukung adalah hukum, prosedur, proses, pengaturan sosial, dan faktor dan keadaan lain dalam lanskap yang mendukung (atau dapat mendukung) perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan/atau dapat menangani dan mengurangi dampak aktual dan potensial hak asasi manusia dan akar permasalahannya. Ini termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan hak asasi manusia, yang merupakan tindakan pencegahan yang secara sengaja diadopsi untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia..

2.2.2 Pekerja paksa	Insiden kerja paksa yang relevan dengan aktivitas ekonomi yang diminati	Tergantung-lanskap	2.2.2.1 Metrik ditentukan-penilai berdasarkan kondisi pendukung yang teridentifikasi (wajib) 2.2.2.2 Perkiraan jumlah pekerja paksa dalam kegiatan ekonomi yang diminati (direkomendasikan)
2.2.3 Hak-hak pekerja	Penghormatan terhadap hak-hak pekerja lainnya termasuk kebebasan berserikat, pembatasan jam kerja, perlindungan dari diskriminasi, dan penyediaan lingkungan kerja yang aman	Tergantung-lanskap	2.2.3.1 Metrik ditentukan-penilai berdasarkan kondisi pendukung yang teridentifikasi (wajib)
2.2.4 Hak asasi manusia lainnya	Status hak asasi manusia lainnya yang berpotensi dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi	Tergantung-lanskap	2.2.4.1 Metrik ditentukan-penilai berdasarkan kondisi pendukung yang teridentifikasi dari hak asasi manusia lainnya (wajib)

Mengingat kebaruan dalam menilai hak asasi manusia pada skala lanskap, LandScale berkolaborasi erat dengan Proforest dan tim IDH Verified Sourcing Area untuk mengembangkan pendekatan yang disajikan dalam LandScale versi 0.2. Bersama-sama, kelompok ini terlibat dengan organisasi ahli dan prakarsa lanskap untuk mendapatkan masukan dan umpan balik mereka tentang elemen kritis dari penilaian hak asasi manusia tingkat lanskap. Hasil dari pekerjaan ini adalah pendekatan untuk mengidentifikasi dan menilai masalah hak asasi manusia pada skala lanskap. Panduan berikut ini merupakan adaptasi dari pendekatan ini untuk ruang lingkup dan spesifikasi penilaian LandScale.

Untuk mendukung penerapan pendekatan ini, kami mereferensikan beberapa metodologi dan alat yang ada dalam tabel di bawah ini untuk membantu penilai melakukan proses ini.² LandScale menyadari bahwa informasi tentang masalah hak asasi manusia di tingkat lanskap mungkin tidak selalu tersedia dan dapat diakses. Mengingat kendala ini, pendekatan lanskap lebih menekankan pada konsultasi pemangku kepentingan dan studi kepustakaan. Panduan berikut ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang praktis namun kuat untuk mengidentifikasi masalah HAM aktual dan potensial yang merugikan di tingkat lanskap. LandScale akan menguji pendekatan ini selama tahap uji coba versi 0.2 dan menggabungkan pelajaran yang diperoleh untuk peluncuran versi 1.0 pada tahun 2021.

² LandScale telah mengidentifikasi daftar alat dan sumber daya yang relevan untuk membantu penilai di setiap tahap penilaian. Alat-alat ini dibahas dalam dokumen ini di akhir setiap tahap dan daftar lengkap juga tersedia dalam dokumen Pilar Sumber Daya secara terpisah, tersedia untuk Pilot LandScale.

Penilaian hak asasi manusia LandScale adalah proses 4 tahap untuk mencapai dua sasaran:

1. Menentukan apakah indikator tergantung-lanskap dapat diterapkan di lanskap yang dipilih (Langkah 3 dari panduan penilaian LandScale)
2. Mendesain dan mengevaluasi metrik kinerja yang sesuai konteks berdasarkan kondisi pendukung lokal (Langkah 4 dari panduan penilaian LandScale).

Proses tersebut mengikuti langkah dan logika yang sama dengan indikator lain dari kerangka penilaian LandScale, kecuali bahwa ini memerlukan proses konsultasi yang lebih mendalam dengan pemegang hak, ahli, dan pemangku kepentingan lainnya. Prosesnya dijelaskan lebih detail pada gambar 2 dan tabel 1.

Pertimbangan umum sebelum memulai penilaian:

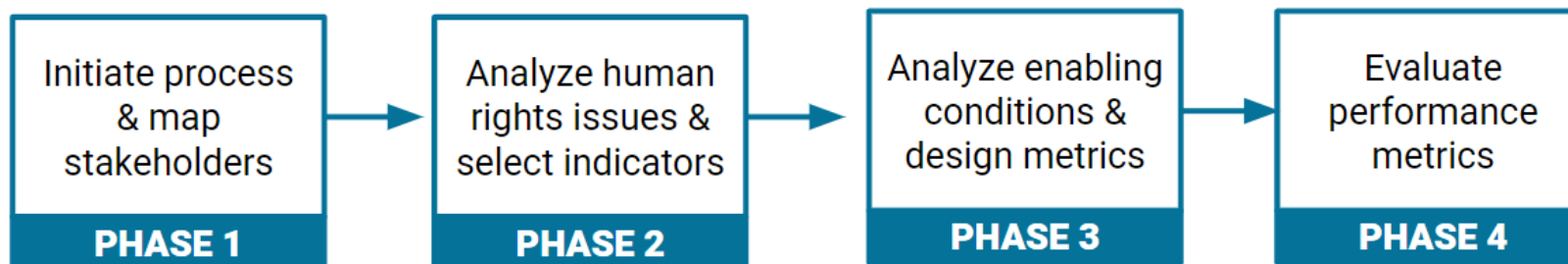
- **Manfaatkan penilaian untuk Tujuan 2.1 dan 3.1:** Penilai harus mencari peluang dan sinergi dengan sumber data dari indikator LandScale lainnya yang dapat menjadi sumber informasi penilaian hak asasi manusia. Misalnya, jika pengumpulan data primer diperlukan untuk indikator kemiskinan menurut Tujuan 2.1, survei rumah tangga yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi ini mungkin juga dirancang untuk memasukkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia.
- **Libatkan pemangku kepentingan yang relevan selama proses:** Kelompok-kelompok tipikal yang perlu dipertimbangkan dan diikutsertakan selama proses penilaian hak asasi manusia antara lain³:
 - Pemegang hak: Semua manusia adalah pemegang hak di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Keterlibatan harus memprioritaskan kelompok yang hak asasi manusianya tidak sepenuhnya direalisasikan, dihormati atau dilindungi dalam konteks tertentu.
 - Pengemban tugas: Aktor yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab tertentu untuk menghormati, memajukan, dan mewujudkan hak asasi manusia dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk pada aktor negara, tetapi aktor non-negara juga dapat dianggap sebagai pengemban tugas.
 - Pihak lain yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tentang hak asasi manusia: Misalnya, LSM dan serikat pekerja⁴

³ Direkomendasikan oleh the Danish Institute on Human Rights serta [Guidance and toolbox on Human Rights impact assessments](#) (lihat halaman 6).

⁴ Definisi ini diadaptasi dari the [Danish Institute for Human Rights](#).

Gambar 2. Gambaran Umum Proses Penilaian Indikator Hak Asasi Manusia

Lihat tabel 1 untuk ringkasan setiap tahap dan posisinya dalam kaitannya dengan keseluruhan proses penilaian LandScale yang ditentukan dalam panduan penilaian.



Tabel 1. Ringkasan proses penilaian

Kegiatan	Output yang harus dihasilkan
Tahap 1. Memulai proses & memetakan pemangku kepentingan⁵	
a. Susun tim yang akan melakukan penilaian sesuai dengan persyaratan LandScale (Lihat bagian 1.1 panduan penilaian) b. Kembangkan pemahaman dasar tentang masalah hak asasi manusia melalui studi kepustakaan ⁶ c. Petakan pemangku kepentingan utama dan konsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan dan pakar/ahli yang diidentifikasi <i>Tahap ini terkait dengan, dan dapat dilakukan berkoordinasi dengan, Langkah 1 panduan penilaian LandScale (Persiapan).</i>	1. Justifikasi komposisi dan kapasitas tim penilai yang relevan dengan hak asasi manusia 2. Peta pemangku kepentingan 3. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini 4. Ringkasan dan kesimpulan utama dari konsultasi pemangku kepentingan

⁵ Meskipun tugas persiapan ini dilakukan pada awal proses, penilai didorong untuk melengkapi dan meninjau kembali kedua analisis tersebut sesering yang diperlukan..

⁶ Sebelum ini terjadi, penilai harus sudah mempersempit ruang lingkup kegiatan ekonomi yang akan dicakup dalam penilaian hak asasi manusia (ini diperlukan sebagai bagian dari Analisis Situasi Lanskap).

<p>Tahap 2. Menganalisis masalah-masalah hak asasi manusia & memilih indikator</p>	
<p>a. Analisis informasi yang dikumpulkan selama konsultasi pemangku kepentingan dari tahap sebelumnya</p> <p>b. Tentukan tingkat keparahan masalah hak asasi manusia di lanskap dan pilih indikator yang berlaku</p> <p><i>Tahap ini terkait dengan, dan dapat dilakukan berkoordinasi dengan, Langkah 3 panduan penilaian LandScale (Pemilihan Indikator).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan indikator yang berlaku 2. Justifikasi dan bukti untuk indikator yang tidak berlaku 3. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini
<p>Tahap 3. Menganalisis kondisi pendukung & mendesain metrik</p>	
<p>a. Memahami akar penyebab dari dampak merugikan hak asasi manusia yang aktual dan potensial dan mengidentifikasi kondisi pendukung yang perlu ada di tingkat lanskap untuk mengatasi dampak ini</p> <p>b. Mendesain metrik kinerja untuk kondisi pendukung yang paling relevan, yang paling penting dari kondisi pendukung ini dan mendesain metrik kinerja untuk mengukur status, atau kemajuan menuju, mencapai kondisi pendukung ini untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan masalah hak asasi manusia</p> <p><i>Tahap ini terkait dengan, dan dapat dilakukan berkoordinasi dengan, Langkah 4 Panduan penilaian LandScale (Pemilihan & Penilaian Metrik).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar kondisi pendukung yang teridentifikasi untuk setiap indikator yang berlaku 2. Daftar metrik kinerja yang diusulkan dengan status atau hasil yang diinginkan masing-masing 3. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini
<p>Tahap 4. Mengevaluasi metrik kinerja dan melaporkan hasil</p>	
<p>a. Menilai metrik kinerja yang dipilih</p> <p>b. Melaporkan dan memvalidasi hasil dengan pemangku kepentingan utama, terutama pemegang hak</p> <p><i>Tahap ini terkait dengan, dan dapat dilakukan berkoordinasi dengan, Langkah 4 (Pemilihan & Penilaian Metrik) dan Langkah 5 (Hasil Pelaporan) dari panduan penilaian LandScale.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian setiap metrik kinerja 2. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini

Tahap 1: Memulai Proses & Memetakan Stakeholder

Kegiatan	Panduan
<p>1a. Komposisi tim penilai</p> <ul style="list-style-type: none"> → Mengidentifikasi komposisi dan kapasitas tim penilai; → Menjelaskan dan mendiskusikan metodologi lapangan dan survei; → Menyetujui tanggung jawab dalam tim; → Menyetujui metode pencatatan dan penulisan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan persyaratan dari bagian 1.1 panduan penilaian, setidaknya menyertakan satu mitra lokal yang cakap dengan keahlian yang relevan. Orang/organisasi ini harus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menguasai bahasa lokal; ○ Berkomitmen pada penilaian yang obyektif dan inklusif, termasuk kesediaan untuk terlibat secara terpisah dengan kelompok yang terpinggirkan atau rentan sejauh yang diperlukan untuk memahami perspektif mereka dengan benar; ○ Memahami masalah hak asasi manusia yang mempengaruhi masyarakat dan komunitas lokal; ○ Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah hak asasi manusia dan penilaian dampak; ○ Memiliki pengalaman melakukan survei rumah tangga, wawancara, kelompok fokus, dan jenis keterlibatan lainnya dengan komunitas lokal; ○ Memiliki pemahaman dan pengetahuan umum tentang budaya, konteks, dan politik lokal. <p>Semua hal di atas adalah elemen penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan para pemangku kepentingan merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi informasi.</p>

1b. Studi lingkup kepustakaan

Studi kepustakaan, termasuk wawancara dengan ahli permasalahan, memberikan masukan untuk pemilihan indikator hak asasi manusia. Studi ini harus mencakup:

- Untuk setiap indikator hak asasi manusia, pahami persyaratan minimum hukum nasional dan internasional;
- Untuk setiap masalah hak asasi manusia, gambarkan praktik-praktik adat di lanskap;
- Untuk setiap masalah, identifikasi organisasi utama yang akan diajak berkonsultasi untuk mendapatkan pemahaman awal tentang dampak merugikan hak asasi manusia yang aktual dan potensial, dan pemegang hak mana yang paling rentan;
- Untuk setiap masalah, kembangkan karakterisasi awal ada atau tidak adanya kondisi yang memungkinkan dan perlindungan untuk melindungi hak asasi manusia.

- Mengidentifikasi organisasi ahli melalui berbagai saluran, termasuk berkonsultasi dengan organisasi internasional untuk membantu mengidentifikasi organisasi regional atau lokal. Penilai harus berusaha untuk memasukkan organisasi ahli dari setidaknya kategori berikut:
 - Pakar hak asasi manusia dan/atau CSO yang memahami dan bekerja secara lokal
 - Ahli masyarakat adat/CSO yang bekerja secara lokal
 - Organisasi serikat pekerja dan/atau LSM hak-hak buruh
 - Petani dan asosiasi bisnis lokal
 - Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) atau departemen tenaga kerja pemerintah
- Berkonsultasi dengan departemen pemerintah lokal dan nasional, lembaga hak asasi manusia lokal atau nasional, lembaga internasional, CSO, perwakilan masyarakat adat, pendukung pemegang hak, universitas, dan serikat pekerja/pekerja untuk menentukan tingkat risiko dan masalah yang terkait dengan semua indikator hak asasi manusia. Jika ada celah informasi tingkat lanskap yang terungkap lewat konsultasi ini, gunakan data nasional atau sektor sebagai proxy dan titik awal. Sejauh ditemukan adanya celah data, identifikasi prioritas untuk pengumpulan data primer (misalnya, penilaian tingkat lanskap secara cepat) untuk membantu mengisinya.
- Mengkarakterisasi praktik-praktik adat dan situasi pemegang hak untuk kegiatan ekonomi yang tercakup yang ada di lanskap (misalnya, seperti apa proses perekrutan pekerja pada umumnya; apakah pekerja umumnya permanen versus musiman atau dikontrak; sejauh mana tenaga kerja migran digunakan; dan sejauh mana perempuan dan kelompok rentan lainnya dimasukkan atau dikecualikan).
- Mendokumentasikan setiap pelanggaran hak asasi manusia yang diketahui atau dicurigai atau konflik lahan terkait dengan perubahan penggunaan lahan baru-baru ini. Jelaskan konsekuensinya bagi komunitas lokal. Penilaian ini harus mengacu pada informasi dalam analisis situasi lanskap dan terkait dengan indikator pada Pilar 1 dan 3.
- Analisis pengaturan hukum dan peraturan.
- Sebagai bagian dari analisis konteks hukum dan peraturan, peringkat negara dalam masalah hak asasi manusia juga dapat menjadi indikasi yang baik tentang apakah indikator tergantung-lanskap dapat diterapkan dalam konteks tertentu.

1c. Pemetaan dan konsultasi pemangku kepentingan	
<ul style="list-style-type: none"> → Memetakan pemegang hak yang sedang atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang ada dan yang direncanakan/di masa depan di lanskap; → Memutuskan siapa yang akan diajak berkonsultasi mengidentifikasi dampak merugikan hak asasi manusia yang aktual dan potensial; → Merancang sampel survei dan metode wawancara; → Melakukan wawancara dengan pemegang hak terpilih dan pemangku kepentingan utama lainnya; → Untuk setiap masalah hak asasi manusia, kaji apakah pemegang hak memandang masalah dengan cara yang sama seperti yang dicirikan oleh ahli hak asasi manusia dan dokumentasi (dari langkah 1b di atas). 	<p>Dengan pemahaman awal tentang masalah hak asasi manusia dan pengaturan hukum dan peraturan berdasarkan studi kepustakaan, penilai harus melanjutkan untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan mewawancarai pemangku kepentingan dan pemegang hak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang menonjol (termasuk dampak merugikan hak asasi manusia yang aktual dan potensial) dan menilai tingkat keparahannya di lanskap. Setelah wawancara dilakukan, penilai harus menentukan sejauh mana perspektif pemegang hak tentang hak asasi manusia cocok dengan yang diidentifikasi oleh studi kepustakaan di langkah 1b. Jika ada perbedaan yang signifikan, maka wawancara dengan pemegang hak tambahan dan pemangku kepentingan mungkin diperlukan untuk lebih memperjelas situasi.</p> <p>Untuk pemetaan pemangku kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identifikasi awal siapa yang mungkin menjadi pemegang hak paling rentan dan terpinggirkan di antara para pekerja dan komunitas lokal (misalnya pekerja migran, pemuda, dan perempuan); ● Sedapat mungkin, lakukan setidaknya satu wawancara dengan semua kelompok pemangku kepentingan yang teridentifikasi dan relevan dari kegiatan pemetaan. Jika pemetaan pemangku kepentingan mengidentifikasi terdapat banyak kelompok pemangku kepentingan, penilai harus memprioritaskan setidaknya 10 kelompok untuk dilakukan wawancara. ● Sertakan setidaknya satu perwakilan dari setiap kelompok pemegang hak dan pengembalian tugas yang diidentifikasi terkait dengan ruang lingkup kegiatan ekonomi fokus (dipilih dalam Analisis Situasi Lanskap); ● Memastikan keragaman di seluruh kelompok yang diwawancarai dan kelompok rentan dilibatkan; ● Untuk menilai berbagai masalah dan skenario hak-hak pekerja, konsultasikan dengan perwakilan pekerja tetap, pekerja musiman, pekerja kontrak, dan pekerja migran. Pertimbangkan kriteria-kriteria berikut saat menentukan sampel studi untuk perwakilan pekerja: <ul style="list-style-type: none"> ○ Libatkan pekerja perempuan; ○ libatkan pekerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih mungkin menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia (misalnya pekerja yang menangani pestisida). ● Pertimbangkan kriteria berikut saat menentukan sampel studi untuk pemberi kerja (satu kelompok pengembalian tugas):

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Libatkan manajer yang terlibat dalam pengadaan, pemilihan, dan pengelolaan pekerja (misalnya sumber daya manusia dan supervisor lini); ○ Libatkan manajer yang bertanggung jawab atas hubungan masyarakat (misalnya CSR atau manajer keberlanjutan); ○ Libatkan manajer yang bertanggung jawab atas area tempat pekerja rentan dipekerjakan. <ul style="list-style-type: none"> ● Pertimbangkan kriteria berikut saat menentukan sampel studi untuk komunitas lokal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Libatkan komunitas yang paling dekat dengan kegiatan ekonomi utama; ○ Libatkan individu, kelompok, atau komunitas yang menjual tanah atau dipaksa untuk pindah atau menyerahkan kepemilikan atau penggunaan tanah untuk memberi ruang bagi operasi bisnis; ○ Libatkan kelompok rentan dalam masyarakat (misalnya penyandang disabilitas, pemuda, dan perempuan). <p>Untuk sampel survei dan metodologi wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk memastikan berbagai perspektif yang relevan, gunakan pengambilan sampel bertingkat atau pendekatan serupa yang mencakup variasi dalam kriteria yang relevan seperti kelompok usia, latar belakang budaya, agama, tingkat pendapatan, jenis kelamin, dan area lanskap⁷; ● Wawancara dapat dilakukan dengan individu dan/atau dalam kelompok fokus. Pertimbangkan untuk melakukan diskusi kelompok fokus untuk menangkap perspektif yang belum dimasukkan dalam, atau yang akan didapatkan melalui, wawancara individu. Terlepas dari format yang digunakan, ikuti praktik-praktik yang baik untuk wawancara semi-terstruktur tentang topik sosial. Rancang wawancara untuk mencakup semua indikator LandScale yang relevan di mana orang yang diwawancarai memiliki perspektif yang relevan atau informasi yang sah untuk dibagikan. ● Berusaha untuk mengumpulkan data kuantitatif (misalnya, jumlah konflik hak atas tanah, data tentang upah) serta data kualitatif. ● Di akhir setiap wawancara atau kelompok fokus, validasi informasi yang direkam untuk memastikan pelaporan yang akurat tentang pandangan responden.
--	--

⁷ Pemilihan pendekatan pengambilan sampel akan bergantung pada batas lanskap dan distribusi komponen sosial ekonomi utama di seluruh wilayah lanskap, seperti lokasi masyarakat. Jika penilai ingin memprioritaskan representasi geografis, pengambilan sampel jaringan dapat dilakukan. Hal ini pada dasarnya memerlukan pembagian lanskap ke dalam kisi-kisi dan pemilihan komunitas serta pemangku kepentingan terkait dan pemegang hak dari setiap kotak (atau subset acak dari kotak). Penting untuk disebutkan bahwa sampel yang murni acak mungkin tidak bisa menangkap sudut pandang dari berbagai jenis komunitas dengan tepat. Yang terakhir ini menjadi masalah ketika hanya ada beberapa komunitas di lanskap atau komunitas yang sangat bervariasi dalam cara mereka berinteraksi dengan lanskap.

Praktik-praktik umum yang baik dan langkah-langkah persiapan:

- Pastikan komunikasi yang efektif dengan tokoh masyarakat, pekerja, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya yang diwawancarai. Ini termasuk memperkenalkan anggota tim, menjelaskan tujuan penilaian, dan mengklarifikasi ekspektasi yang terkait. Cari tanda-tanda “kelelahan penelitian (research fatigue)” dan pertimbangkan untuk mewawancarai pemangku kepentingan lainnya jika calon narasumber tidak menyambut percakapan atau tampaknya tidak cenderung memberikan informasi yang jujur.
- Pastikan bahwa pemegang hak menyadari hak-hak mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam percakapan tentang hak-hak ini.
- Pertimbangkan dinamika antarpribadi (termasuk dinamika gender) saat merancang metode wawancara dan kelompok fokus untuk memastikan bahwa perempuan, minoritas, dan orang yang berpotensi rentan dapat menyuarakan perspektif mereka tanpa kendala.
- Mengupayakan semua cara yang diperlukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam penilaian tidak berdampak negatif pada responden atau peserta. Ini termasuk penghormatan yang ketat terhadap kerahasiaan tanggapan dan anonimitas responden. Data harus dianonimkan untuk melindungi informasi yang dapat diidentifikasi secara individu dan tidak boleh dilaporkan dengan cara yang memungkinkan untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan informasi tentang individu.
- Pewawancara harus dilatih dengan baik dan diberi waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa interaksi pemangku kepentingan memiliki kualitas setinggi mungkin dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan.

Tindakan pencegahan penting untuk dipertimbangkan:

- Pewawancara harus dilatih secara khusus tentang pengumpulan data masalah hak asasi manusia, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari efek yang merugikan terhadap peserta. Tindakan pencegahan semacam itu biasanya mencakup pemilihan tempat yang aman untuk wawancara di luar wilayah kerja, menghindari penggunaan istilah yang dimuat seperti 'kerja paksa' dan 'perdagangan manusia (trafficking)' selama percakapan, menghindari harapan yang salah dari partisipasi dalam survei, dan memberikan perlakuan yang sesuai terhadap responden anak.
- Karena penilaian hak asasi manusia sering kali dapat menimbulkan risiko, terutama di area di mana pelanggaran hak asasi manusia terjadi, pelatihan pewawancara juga harus mencakup prosedur untuk menghadapi situasi bahaya.⁸

Keterlibatan pemangku kepentingan:

- Pemetaan pemangku kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari Tahap 1 untuk mendapatkan pemahaman awal tentang masalah hak asasi manusia di lanskap. Untuk proses pada bagian ini, keterlibatan secara langsung bersifat opsional: dapat diterima untuk melakukan semua penugasan dari jarak jauh jika tim penilai menilai ini sebagai cara yang efektif untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Namun, penilai didorong untuk bertemu langsung dengan pemangku kepentingan utama dan terutama pemegang hak sedini mungkin dalam prosesnya.

Output yang harus dihasilkan dari tahap 1:

1. Justifikasi komposisi dan kapasitas tim penilai yang relevan dengan hak asasi manusia.
2. Peta pemangku kepentingan (dapat diperbarui selama penilaian).
3. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini.
4. Ringkasan dan kesimpulan utama dari pelibatan pemangku kepentingan.

Alat-alat yang relevan untuk membantu pengembangan tahap ini:

- Guidance by International Alert tentang pemahaman bagaimana melakukan penilaian hak asasi manusia yang menyeluruh, termasuk pemahaman tentang akar penyebab, di berbagai tingkat (makro, regional dan lokal)
- Human rights impact assessment and guidance toolbox oleh the Danish Institute on Human Rights – phase 1 dan phase 2
- The Getting it Right tool – A Human Rights Impact Assessment Guide: tips dan panduan berguna dalam melakukan HRIA
- Social licence platform: panduan untuk mengidentifikasi ahli untuk menjadi bagian dari tim HRIA
- Sector Wide Impact Assessment (SWIA) oleh the Danish Institute on Human Rights dan the Myanmar Centre for Responsible Business
- Guidance oleh Landesa tentang free, prior and informed consent (FPIC) dan bagaimana melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses ini
- Applying a Social-Ecological Inventory: sebuah workbook untuk mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan utama
- Handbook for monitoring and evaluation of child labor in agriculture: sumber daya untuk mengukur dampak program pertanian dan ketahanan pangan terhadap pekerja anak di pertanian berbasis keluarga
- Stakeholder engagement interview guide oleh the Danish Institute for Human Rights
- Survei Sosial-Budaya, Lingkungan, dan Mata Pencaharian dari NCRC Ghana (tersedia untuk Pilot LandScale)
- Community-Based Human Rights Impact Assessment oleh Oxfam
- Landesa tool and platform: menghubungkan perusahaan dan investor dengan keahlian lokal untuk memandu investasi lahan

⁸ Diadaptasi dari: International Labour Organization ILO. (2018). *Guidelines concerning the measurement of forced labour*. 20th International Conference of Labour Statisticians. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf

Tahap 2: Menganalisis Masalah Hak Asasi Manusia & Memilih Indikator

Kegiatan	Panduan
2a. Analisis data yang dikumpulkan	
<p>→ Analisis informasi yang dikumpulkan selama studi kepustakaan dan wawancara dengan organisasi ahli dan pemangku kepentingan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis informasi yang dikumpulkan pada tahap 1 dan siapkan karakterisasi sintesis dari isu-isu hak asasi manusia, dampak merugikan aktual dan potensial, serta orang dan kelompok dalam lanskap yang terpengaruh. Karakterisasi ini harus mempertimbangkan dampak negatif aktual dan potensial (masa depan), serta dampak kumulatif. • Pastikan untuk mengidentifikasi dan menyoroti perbedaan dan persamaan tanggapan antar kelompok pemangku kepentingan. • Berkonsultasi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk memvalidasi sintesis.
2b. Menentukan tingkat keparahan masalah hak asasi manusia di lanskap dan pilih indikator yang berlaku untuk masalah ini	
<p>→ Mengevaluasi keparahan dampak merugikan aktual atau potensial terhadap setiap hak asasi manusia yang relevan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skala dari dampak negatif yang teridentifikasi. • Cakupan dampak merugikan yang teridentifikasi (jumlah orang yang terkena dampak); • Dampak yang tidak dapat diperbaiki (unremediable).⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkonsultasi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi penentuan tingkat keparahan dan pemilihan indikator. Sertakan kelompok yang biasanya rentan atau terpinggirkan, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan pekerja migran. • Jika salah satu indikator 2.2.1 hingga 2.2.4 ditentukan sebagai 'tidak berlaku' di lanskap, penilai harus memberikan bukti menyeluruh untuk membenarkan keputusan ini.

⁹ Menurut Kerangka Pelaporan Prinsip-Prinsip Panduan PBB, dampak negatif terhadap hak asasi manusia menjadi parah karena salah satu atau lebih dari karakteristik berikut: skala, cakupan, atau irremediabilitas dapat diperbaiki. Skala berarti beratnya dampak terhadap hak asasi manusia. Cakupan berarti jumlah individu yang sedang atau mungkin terpengaruh. Irremediabilitas berarti kemudahan perbaikan atau sebaliknya sulitnya perbaikan bagi mereka yang terkena dampak untuk dapat dipulihkan ke pemenuhan sebelumnya atas hak-haknya.

<p>→ Mengorganisir dialog (virtual atau secara langsung) antara pemegang hak, pengemban tugas, dan organisasi spesialis hak asasi manusia untuk membahas dan menyepakati pemilihan indikator yang berlaku.</p>	
<p>Pelibatan pemangku kepentingan: Keterlibatan pemangku kepentingan untuk tahap 2 umumnya diharapkan dilakukan secara jarak jauh. LandScale mendorong penggunaan survei, lokakarya online, grup fokus online, dan aktivitas virtual lainnya, untuk menjalankan aktivitas seefisien dan seefektif-biaya mungkin. Namun, dalam kasus di mana pemangku kepentingan lanskap seperti kelompok rentan dan/atau terpinggirkan tidak dapat berpartisipasi secara virtual, konsultasi perlu dilakukan secara langsung..</p>	
<p>Output yang harus dihasilkan dari tahap 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan indikator yang berlaku. 2. Justifikasi dan bukti untuk indikator yang tidak berlaku sesuai dengan langkah 3 panduan penilaian LandScale. 3. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini. 	
<p>Alat yang relevan untuk membantu pengembangan tahap ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>MSP Tool Guide</u>: panduan untuk kemitraan multi-pemangku kepentingan oleh Wageningen University (lihat alat 10, 11, dan 18) • <u>Toolkit and guidance for multi-stakeholder consultation workshop</u> oleh Tropenbos and EcoAgriculture Partners • <u>Guidance for companies on how to identify most severe HR issues</u> dari the UN Guiding Principles Reporting Framework • <u>Guidelines for participatory planning, monitoring and evaluation of multi-stakeholder platforms in integrated landscape initiatives</u>: alat untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi kolaborasi multi-pemangku kepentingan pada skala lanskap • <u>Community Toolbox</u>: panduan penelitian partisipatif dengan masyarakat • <u>Guidance for social dialogue</u> by ILO and OECD • <u>A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive Industries</u>: alat dan proses untuk melakukan Analisis Dampak Gender untuk industri ekstraktif • <u>Balancing the Scales: Using Gender Impact Assessment in Hydropower Development</u>: sumber daya dan alat untuk pengembang pembangkit listrik tenaga air dan pemerintah untuk memasukkan penilaian dampak gender secara lebih komprehensif dalam siklus proyek mereka • <u>Guidance to support and empower communities to decide on investment proposals</u> oleh Namati and Columbia Center for Sustainable Investment • <u>Analysing HR impact</u> oleh the Danish Institute for Human Rights 	

Tahap 3: Analisis Kondisi Pendukung & Mendesain Metrik

Kegiatan	Panduan
3a. Identifikasi kondisi pendukung yang relevan secara lokal	
<ul style="list-style-type: none"> → Mengidentifikasi kondisi pendukung yang dapat membantu mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di lanskap; → Undang pemegang hak dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk berpartisipasi dalam hal berikut ini untuk setiap indikator hak asasi manusia yang dipilih untuk berlaku: <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kondisi pendukung tingkat lanskap atau perlindungan minimum yang perlu ada untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak negatif terhadap setiap hak asasi manusia, dan • Jika kondisi pendukung tertentu ada tetapi hanya efektif sebagian, identifikasi bagaimana sistem yang ada ini perlu diadaptasi atau ditingkatkan untuk secara efektif mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak negatif terhadap setiap hak asasi manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti disebutkan sebelumnya, kondisi pendukung adalah seperti hukum, prosedur, proses, pengaturan sosial, dan faktor dan keadaan lain dalam lanskap yang mendukung (atau dapat mendukung) perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan/atau dapat menangani dan mengurangi potensi aktual dan potensial dampak hak asasi manusia dan akar penyebabnya. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan tindakan pencegahan yang sengaja diadopsi untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. • Sebagai titik awal, penilai harus meninjau daftar kondisi pendukung umum yang disediakan dalam Lampiran 4 dan menentukan mana yang paling relevan dengan indikator hak asasi manusia yang dipilih. • Penilai kemudian harus mengusulkan kondisi pendukung tambahan, jika diperlukan, untuk mengidentifikasi serangkaian kondisi atau tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan masalah hak asasi manusia yang signifikan di lanskap dengan benar. Penilai harus mempertimbangkan kondisi pendukung di masing-masing dari empat kategori berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan: Pencegahan harus menangani berbagai faktor sosial budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang mempengaruhi hak asasi manusia. • Perlindungan: Perlindungan harus memastikan bahwa orang yang tidak memiliki hak asasi manusia dapat pulih dari pelanggaran. • Pemulihan: Komponen pemulihan harus memberi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia akses ke keadilan dan kompensasi atas cedera, kehilangan, atau kerugian-materi atau moral-. • Penegakan: Penegakan mengacu pada penguatan administrasi ketenagakerjaan dan peradilan pidana untuk mencegah degenerasi pelanggaran hak asasi manusia, mengidentifikasi lebih banyak kasus, dan membawa pelaku ke pengadilan.¹⁰ • Proses mengidentifikasi kondisi pendukung harus mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan dan ahli yang terlibat dalam tahap 1, dan dengan pemegang hak tambahan dan pemangku kepentingan yang sedang atau mungkin terpengaruh oleh kegiatan ekonomi utama yang sedang berlangsung atau direncanakan.
3b. Mendesain metrik kinerja untuk kondisi pendukung yang paling relevan	
<ul style="list-style-type: none"> → Pilih yang paling penting dari kondisi pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan proses partisipatif untuk memilih kondisi pendukung dan mendesain metrik kinerja, yang melibatkan kelompok yang sama yang disebutkan dalam panduan untuk

<p>yang teridentifikasi untuk setiap indikator hak asasi manusia;</p> <p>→ Mendesain metrik kinerja untuk mengukur status, atau kemajuan menuju, mencapai kondisi pendukung ini untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan masalah hak asasi manusia;</p> <p>→ Untuk setiap indikator, penilai harus memilih setidaknya satu metrik struktural, setidaknya satu metrik proses, dan setidaknya satu metrik hasil (setiap indikator harus memiliki setidaknya 3 metrik kinerja secara total);</p> <p>→ Laksanakan proses seleksi dan desain ini secara partisipatif, dengan mengupayakan konsensus sejauh mungkin.</p>	<p>langkah 3a di atas. Proses ini harus diintegrasikan dengan analisis teknis penilai sendiri untuk mengidentifikasi kondisi pendukung mana yang paling kritis untuk mengatasi pendorong yang mendasari dan akar penyebab masalah hak asasi manusia, dan mana yang paling realistis dan layak untuk dilembagakan atau ditingkatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pendukung yang dapat ditetapkan atau dipengaruhi pada tingkat lanskap umumnya paling sesuai sebagai dasar untuk metrik kinerja LandScale, tetapi ketika dampak utama hak asasi manusia atau akar penyebab memerlukan tindakan pada skala yang berbeda, kondisi pendukung ini juga harus disertakan untuk memberikan penilaian kemajuan yang valid dan seimbang (atau ketiadaan) untuk menangani dampak dan penyebabnya. • Direkomendasikan untuk menggunakan metrik kinerja kuantitatif dan kualitatif. • Sebagai bagian dari proses partisipatif, metrik kinerja yang diusulkan harus divalidasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa metrik tersebut dianggap sebagai cara yang valid untuk menilai faktor dan kondisi pendukung yang diperlukan untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan masalah hak asasi manusia yang tercakup dalam indikator yang dipilih. <p>Kriteria untuk metrik kinerja: Setidaknya satu metrik kinerja harus disertakan dari masing-masing tiga kategori berikut ¹¹:</p> <ol style="list-style-type: none"> Metrik struktural (komitmen) mencakup ratifikasi dan adopsi instrumen hukum dan keberadaan serta penciptaan mekanisme kelembagaan dasar yang diperlukan untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. <i>Contoh:</i> Perjanjian hak asasi manusia internasional dan ILO yang relevan dengan hak atas pekerjaan yang diratifikasi oleh Negara. Metrik proses (upaya) mengukur upaya pengemban tugas untuk mengubah komitmen hak asasi manusia mereka menjadi hasil yang diinginkan dengan mengambil tindakan khusus untuk mencapai tujuan ini. <i>Contoh:</i> Proporsi pekerja sektor informal yang beralih ke pekerjaan sektor formal selama periode pelaporan. Metrik hasil (hasil) harus mencakup pencapaian individu dan kolektif yang mencerminkan keadaan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks tertentu. Indikator hasil mengkonsolidasikan, dari waktu ke waktu, dampak dari berbagai perbaikan struktural dan proses yang mendasarinya. Metrik hasil bisa bergerak
--	---

¹⁰ Komponen ini diadaptasi dari: International Labour Organization. (2018b). Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes. ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/--ipecc/documents/publication/wcms_653986.pdf

¹¹ Definisi dan contoh diambil dari: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2012). *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation*. OHCHR. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human_rights_indicators_en.pdf

	<p>lambat dan kurang sensitif untuk menangkap perubahan sesaat daripada metrik proses.¹² <i>Contoh:</i> Kejadian insiden pekerjaan, termasuk tindak kekerasan, cedera diri, penyakit, atau kematian.</p>
<p>Pelibatan pemangku kepentingan: Tahap 3 melibatkan keputusan paling spesifik dan konsekuensial tentang desain pendekatan penilaian hak asasi manusia untuk lanskap tertentu. Oleh karena itu, upaya konsultasi tatap muka harus diprioritaskan untuk tahap ini. Idealnya, semua konsultasi untuk tahap 3 harus dilakukan secara langsung. Namun, jika tidak memungkinkan, penilai dapat menggunakan pendekatan campuran, dengan berkonsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan dan kelompok secara jarak jauh..</p>	
<p>Output yang harus dihasilkan dari tahap 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar kondisi pendukung yang teridentifikasi untuk setiap indikator yang berlaku. 2. Daftar metrik kinerja yang diusulkan dengan status atau hasil yang diinginkan masing-masing. 3. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini. 	
<p>Alat-alat yang relevan untuk membantu pengembangan tahap ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 4 LandScale tentang Kondisi Pendukung Hak Asasi Manusia <p>Mekanisme Pengaduan Operasional (Operational Grievance Mechanism-OGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guidance on good practices grievance mechanisms oleh Business Respect for Human Rights • Guiding principle 31: tentang praktik-praktik baik dan Operational Grievance Mechanism (OGM) yang efektif oleh the UN Guiding Principles on Business and Human Rights • Guide on Effective OGM: laporan tentang apa yang merupakan OGM yang efektif, oleh tim dari International Commission of Jurists <p>Penggunaan teknologi melibatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guidance on Worker Engagement Supported by Technology principles (WEST principles) oleh Humanity United dan Labor link oleh Good World Solutions • Catatan info tentang Worker Voice Technologies oleh Proforest • Use of local CSOs to help with independent monitoring of negative impacts oleh Earthworm. Ini termasuk alat 'Kumacaya', yang didasarkan pada survei online (Signal) untuk CSO, pekerja, petani kecil dan komunitas lokal yang dapat melaporkan masalah positif dan negatif (Lihat juga Kumacaya, Signal) <p>Panduan terkait dengan FPIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • FPIC Guide for RSPO members • UN-REDD Guidelines on Free, Prior and Informed Consent • UNDP guidance Info note #6, Indigenous Peoples Guideline • FAO Guide tentang respecting free, prior and informed consent (FPIC) 	

¹² United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2012). *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation*. OHCHR. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human_rights_indicators_en.pdf

Alat-alat lainnya dan sumber daya yang relevan

- Guidance on main principles of a worker driven social responsibility network: ini termasuk referensi briefing note tentang prinsip-prinsip utama Worker Driven Social Responsibilities (WSR) serta beberapa case studies
- Preliminary findings on case studies on addressing human rights at landscape level oleh the Forest Peoples Programme, termasuk kasus-kasus di Indonesia dan Ekuador
- Guidelines on Incorporating Human Rights Standards and Principles: berisi panduan untuk membantu mengembangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia di semua bidang prioritas dan sektor kerja sama pembangunan dan untuk memberikan bantuan penilaian wajib atas risiko dan dampak hak asasi manusia.
- Integrating New Data to Assess risks of forced labor in agriculture (ISEAL – Ergon): menggunakan pemetaan risiko subnasional untuk memberikan gambaran umum tentang risiko geografis relatif dan menggunakan pengetahuan ini untuk memfokuskan penyelidikan lebih lanjut dan untuk mendeteksi pekerja yang rentan di tingkat tempat kerja dengan lebih baik
- Free Prior Informed Consent Protocols oleh the European Network on Indigenous Peoples

Tahap 4: Evaluasi Metrik Kinerja

Kegiatan	Panduan
4a. Menilai metrik kinerja yang dipilih	
<p>→ Selain memastikan bahwa metrik kinerja yang dipilih memenuhi semua kriteria yang disebutkan sebelumnya, penilai harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menentukan hasil yang diinginkan (yaitu target, tujuan) untuk menangani masalah hak asasi manusia untuk setiap metrik; 2. Pisahkan hasil yang diinginkan ke dalam rangkaian (idealnya 3 tetapi tidak lebih dari 5) tonggak pencapaian (tahapan yang menandai perubahan signifikan dalam pengembangan menuju hasil yang diinginkan). Tonggak pencapaian akan menjadi hasil metrik. 	<p>Metrik kinerja harus ditentukan dengan menentukan hasil (atau status) yang diinginkan terkait dengan setiap kondisi atau faktor pendukung yang diidentifikasi pada sub-langkah sebelumnya (3a). Penilaian metrik kemudian berfokus pada evaluasi kondisi atau kemajuan saat ini yang terkait dengan hasil. Berikut ini adalah contoh hasil dan pencapaian yang diinginkan (hasil metrik) untuk potensi metrik kinerja.¹³</p> <p>Outcome yang diinginkan: Hukum dan regulasi yang mempromosikan keselamatan pekerja</p> <p>Skenario untuk metrik kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang keselamatan pekerja tersedia dengan bukti penegakan hukum yang efektif. • Undang-undang dan peraturan ada tetapi tidak mencakup semua pekerja di lahan (seperti pekerja pertanian sementara/informal) atau tidak ada bukti penegakan yang efektif • Hukum dan peraturan tidak ada atau tidak ada bukti penegakannya.
4b. Melaporkan dan memvalidasi hasil dengan pemangku kepentingan utama	
<p>→ Meninjau hasil penilaian dengan pemegang hak yang dikonsultasikan sebelumnya dalam proses untuk memvalidasi temuan dan menyesuaikan jika perlu;</p>	<p>Hasil draf harus tersedia bagi para pemangku kepentingan dan pemegang hak dalam format dan bahasa yang dapat diakses untuk ditinjau dan divalidasi. Berdasarkan tinjauan ini, penilai harus menyesuaikan hasil penilaian jika perlu, untuk mencerminkan informasi baru atau lebih akurat yang diberikan melalui proses tinjauan yang sebelumnya tidak menjadi faktor dalam penilaian.</p>

¹³ Contoh-contoh ini diambil dari kriteria [Sustainable Landscapes Rating Tool \(SLRT\)](#) tentang kondisi pendukung.

<p>→ Melaporkan hasil penilaian akhir sesuai dengan panduan pada langkah 5 proses penilaian.</p>	
<p>Pelibatan pemangku kepentingan: Upaya konsultasi tatap muka harus diprioritaskan untuk tahap ini. Namun, jika tidak memungkinkan, penilai dapat menggunakan pendekatan campuran, berkonsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan dan kelompok secara jarak jauh..</p>	
<p>Output yang harus dihasilkan dari tahap 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian setiap metrik kinerja. 2. Ringkasan dokumentasi keterlibatan pemangku kepentingan selama tahap ini. 	
<p>Alat-alat yang relevan untuk membantu pengembangan tahap ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Human Rights Indicators</u> oleh The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ● <u>So Pact</u>: perangkat lunak dan sumber daya yang dirancang untuk investor, pembuat hibah, lembaga publik, lembaga nonprofit, dan bisnis untuk secara mudah mengukur dan mengelola dampak sosial dan lingkungan ● <u>Human Rights Impact Assessment guidance and toolbox</u> Phase 5 mencakup panduan tentang bagaimana praktisi HRIA harus memastikan bahwa HRIA mencerminkan pengalaman masyarakat, serta untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi 	